

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pergantian Pemerintah Orde Baru ke Pemerintahan Reformasi terjadi pada pertengahan Tahun 1998 yang telah mengalami perubahan, Sebelumnya sistem Pemerintah Indonesia adalah sentralistik yang menimbulkan ketidakmerataan keadilan bagi Daerah, namun sejak Tahun 1999 sistem pemerintah diubah menjadi Desentralisasi atau yang sering dikenal dengan Era Otonomi Daerah. Alasan diselenggarakannya otonomi daerah ini adalah karena rakyat Indonesia menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonom daerah adalah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan demokratis sistem pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata pemerintah yang lebih cepat tanggap, akuntabel, dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah Daerah (Hoesada, 2016:311).

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk kemandirian Daerah. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren, semakin tinggi rasio kemandirian maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern (terutama pemerintah Pusat) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian Daerah khususnya dibidang keuangan merupakan suatu tuntutan yang mempunyai ciri dimana suatu Daerah mampu berotonomi. Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan Kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Selain itu pemerintah Pusat juga memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan melalui Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Daerah diperbolehkan meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya Kemandirian Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Kemandirian Keuangan Daerah tentunya sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pada Pasal 1 Ayat (2), pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Kegiatan pengelolaan APBD dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang

terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap pemerintah Daerah lainnya (Halim, 2007:232).

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut Otonomi Fiskal atau Desentralisasi Fiskal Dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, apabila pemerintah daerah dapat memperhatikan dan mengelola dengan baik PAD, maka pengelolaan tersebut akan efektif, efisien dan ekonomis. Pentingnya PAD dapat menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya dana akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara Kesatuan adalah penyerahan wewenang fiskal dari otoritas negara yang diwakili pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak mengandung pengertian kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan alokasi anggaran serta bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas daerah (Firdausy, 2017:44).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya memenuhi tuntutan dan tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah melalui Desentralisasi Fiskal. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah Pusat. Sehingga Desentralisasi Fiskal berhubungan dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

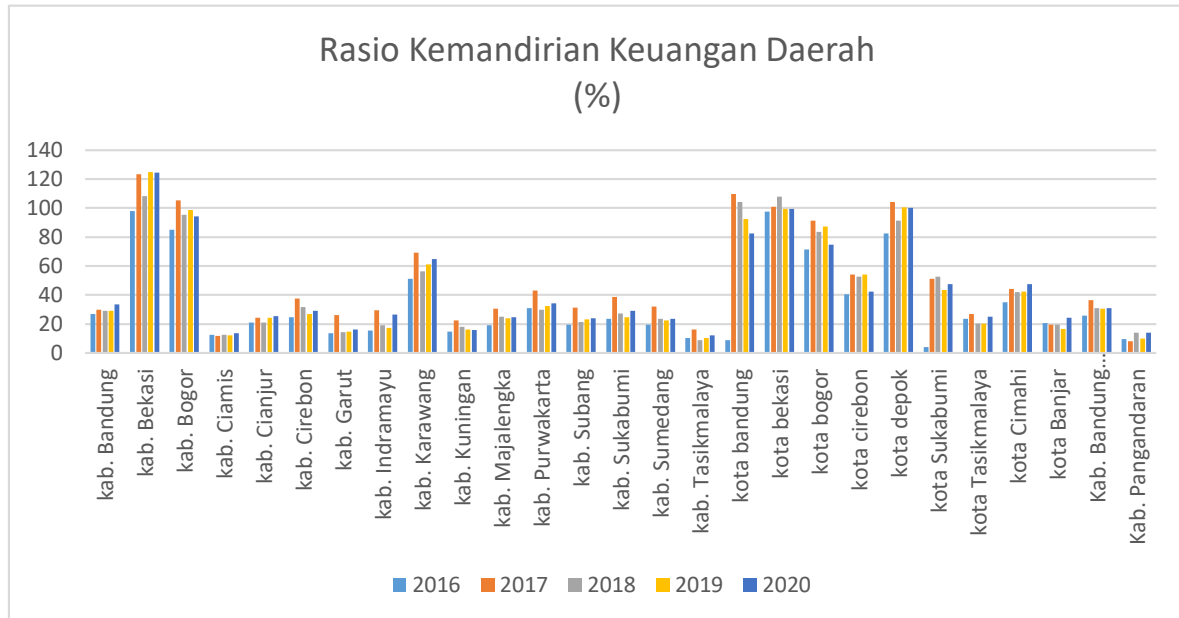
Sedangkan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengukur Efektivitas PAD yaitu dengan menggunakan rasio Pertumbuhan PAD. Rasio pertumbuhan PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan (Mahmudi, 2019:141).

Menurut Ulum (2009:32) menyatakan bahwa semakin tinggi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Dalam artian semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tersebut telah

mampu melaksanakan kewenangan dalam bidang keuangan yaitu dapat mengelola pendapatan/ perpajakan, sehingga realisasi pendapatan bisa sesuai dengan yang ditargetkan. Tingginya komposisi penerimaan yang bersumber dari PAD, dikarenakan pemerintah telah mampu merealisasikan PAD yang ditargetkannya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, karena pemerintah telah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dari paparan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara Efektivitas PAD dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah Pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah pusat berharap agar tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat menggali potensi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat. Berikut

adalah gambaran kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.



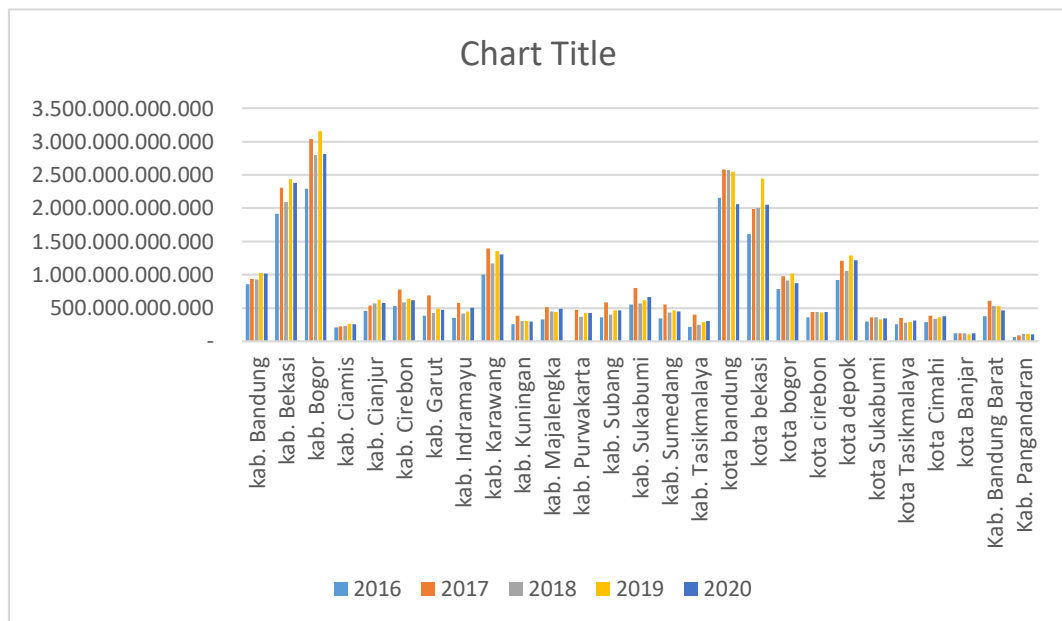
Gambar 1. 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2022 (Data Diolah)

Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan rasio Kemandirian Keuangan Daerah tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Dari Tahun 2016-2020 berfluktuasi. Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah paling tinggi. Pada tahun 2016, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 98%, dan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 123%, sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 108%, dan pada Tahun 2019, 2020 nilainya tetap yaitu sebesar 124%. Hal ini karena Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur regional

yang menjadi perlintasan antara Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota. Kab. Bekasi juga mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar oleh karena itu menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi sudah cukup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan Daerah dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang paling rendah adalah Kab. Pangandaran dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Tahun 2016-2020 sebesar 11%, hal ini dikarenakan Kab. Pangandaran merupakan daerah otonom yang baru terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012, sehingga untuk membiayai kebutuhan daerahnya masih sangat memerlukan dana bantuan yang lebih dari pusat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerahnya.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ini merupakan sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah data realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.



Gambar 1. 2

Realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2022 (Data Diolah)

Pada Gambar 1.2, rata-rata realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2016-2020 tidak merata. Kab. Bogor merupakan daerah dengan PAD terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 2.820.006.092.128. Sementara itu, Kab. Pangandaran tercatat sebagai daerah dengan PAD terendah di Jawa Barat yakni dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 96.256.629.390.

Kab. Bogor merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD-nya. Salah satu potensi PAD Kabupaten Bogor adalah dari sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan, sektor pertanian, perumahan, pariwisata, kuliner. Kemudian dari

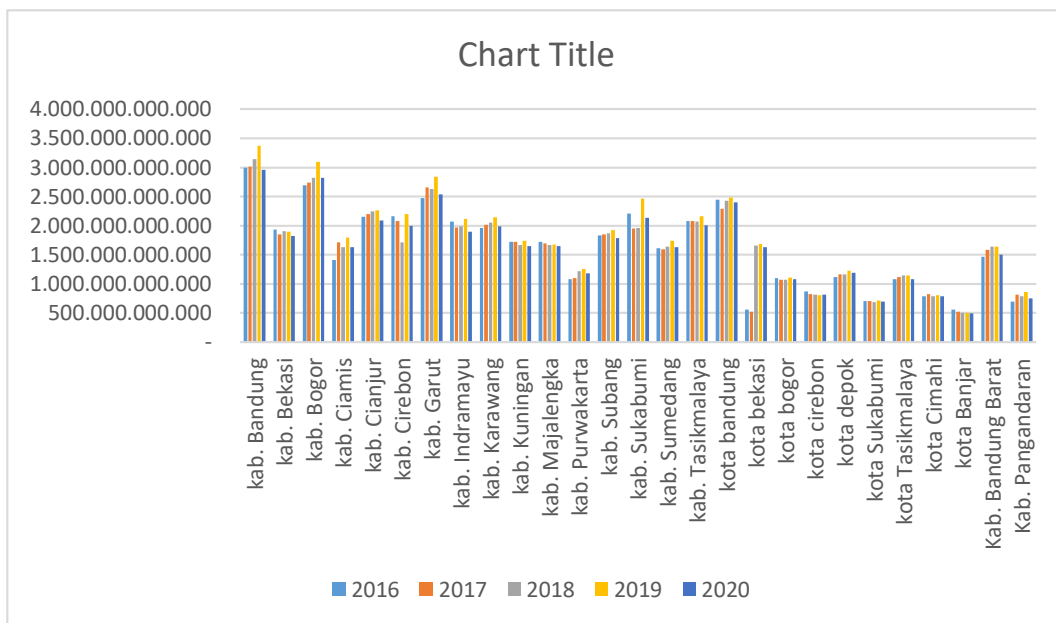
sektor perindustrian dan UMKM yang merupakan keunggulan kompetitif karena letak dan geografisnya berdekatan dengan Ibukota DKI Jakarta.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengoptimalan pendapatan asli daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, pemerintah daerah harus semakin berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dalam desentralisasi, pemberian wewenang kepada pemerintah tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan, salah satu bentuk peran pemerintah pusat yaitu dari dana perimbangan yang berkontribusi dalam APBD. Pemberian dana perimbangan daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dan antar pemerintah Daerah (Pasal 3 Ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah pendapatan pemerintah daerah yang diterima dari pemerintah pusat dan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pemberian dana perimbangan kepada daerah tidak diberikan begitu saja, melainkan memperhatikan potensi, keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing sehingga tercipta pembagian keuangan yang merata, proporsional, efektif dan efisien.

Dana perimbangan merupakan salah satu faktor penentu Kemandirian Keuangan Daerah selain PAD. Kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat salah satunya dapat diamati pada realisasi dana perimbangan daerah yang terjadi di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.3

Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2022 (Data Diolah)

Pada gambar 1.3, Daerah dengan Dana Perimbangan tertinggi adalah Kab. Bandung dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp. 3.094.356.667.272, diikuti oleh Kab. Bogor dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp. 2.834.89.599.876. Sedangkan perolehan dana perimbangan terendah yaitu Kota Banjar dengan jumlah rata-rata perolehan dana perimbangan sebesar Rp. 516.969.756.837. Besarnya nilai dana perimbangan

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan keuangan daerah. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, begitupun sebaliknya.

Selain sebagai penyeimbang keuangan antar pemerintah, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulasi pembangunan di Daerah sehingga secara bertahap Daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari Daerah tersebut. Pemberian dana perimbangan ini seharusnya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu diiringi dengan mandiriya keuangan pemerintah daerah, khususnya fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat merupakan pendapatan asli daerah terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Meskipun kecenderungan pendapatan asli daerahnya meningkat namun rasio kemandirian keuangan tiap daerahnya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hanya 6 daerah saja yang memiliki rasio kemandirian diatas 50%. Artinya 21 daerah lainnya di Jawa Barat masih memiliki rasio kemandirian yang rendah yaitu dibawah 50%. Hal tersebut mencerminkan

masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat.

Karena peranan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat persentasenya masih relatif kecil sehingga tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih terkategori tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan ini menyebabkan kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten/Kota sebagian besar masih didanai oleh dana perimbangan pemerintah pusat.

Terdapat kaitan erat antara penerimaan Daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Sejalan dengan uraian diatas diharapkan dapat meningkatkan PAD-nya berdasarkan potensi daerah yang ada, karena pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapakan ketergantungan Daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu dicapai kinerja keuangan yang baik sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri (Hasan:2014).

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta mengetahui Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ekonomi di suatu wilayah Kabupaten atau Kota serta pemerintah Provinsi

yang bersangkutan. Adapun, penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. M.Ali dan Maisyuri (2017) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di kabupaten aceh utara.
2. Eugnia Christy, Een N Walewangko, Patrick Ch, Wauran (2019) dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan pendapatan transfer sebagai variabel indikator desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai arah positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi utara yang diukur dengan kemandirian keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Khoirul answar dan Lidya Primta Subakti (2013) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Publik Kabupaten Kota Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan kenaikan belanja publik.
4. Pupung Puad Hasan (2014) dengan judul “Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi

Jawa Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal kabupaten dan Kota masih sangat rendah atau kurang, karena ketergantungan pemerintah kabupaten dan Kota terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu mendukung pemerintah daerah untuk dapat menjadi mandiri.

5. Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin dan Tjahjanulin Domai (2014) dengan judul “Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal masih sangat kurang, karena pemerintah kota batu masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat, dan juga desentralisasi fiskal kota batu yang masih sangat kurang, menunjukkan bahwa kota batu belum mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
6. Indrawahyuni (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah kota makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.
7. R. Dian Hardiana, Heraini Tanuatmodjo dan Firina Kurnianti (2010) dengan judul “Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia)”. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian daerah yang tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori pada setiap indikator. Dana transfer masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat masih kategori konsultatif dan partisipatif.

8. Vionza Demora (2016) dengan judul “Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktifitas Belanja Daerah Kota Jambi”. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja di Kota Jambi Tahun 2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif.
9. Moch. Rudy Setyawan dan Syamsul Arif (2019) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017.

10. Anggi Pratama, Bagus. H, Ilham (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian ini menyatakan PAD dan transfer pemerintah pusat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan. Dan secara simultan PAD, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
11. Juli Panglima Saragih (2014) dengan judul “Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi masih terdapat permasalahan. Terkait dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah, walaupun politik desentralisasi fiskal sejak otonomi daerah diberlakukan.
12. Fatmawaty Laraga, Idrus Usu, dan Ilyas Lamuda (2022) dengan judul “analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan Daerah”. hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
13. Ermawati Y.karim, Debby Ch. Rotinsulu dan Maulana Th. B. Maramis (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, investasi pemerintah dan angkatan kerja

tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan berpengaruh, sedangkan investasi pemerintah dan angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi maluku utara.

14. Ifrizal, Dermawis, Dan Sulaiman (2014) dengan judul “Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) investasi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh. (2) Investasi dan pendapatan asli daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh.
15. Fitria Yulianti Kartika Dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo (2017) dengan judul “Penelusuran Peranan Sumber Sumber Pendapatan Dan Fiscal Stress Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap DDF, DAU, berpengaruh negatif terhadap DDF, DAK berpengaruh negatif terhadap DDF, FS berpengaruh positif terhadap DDF.
16. Abdul Bashir (2011) dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan (1) desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. (3) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (4) Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (5) desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

17. Nobu Akai Dan Masayo Sakata (2002) dengan judul "*Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
18. Ghina Kamalia Sofa (2021) dengan judul "*Factors Affecting The Fiscal Decentralization Of Local Government (Case Study In Tasikmalaya City)*". Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif parsial terhadap desentralisasi fiskal dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal.
19. Fidza Amalina, Moh.Khusaini Dan Setyo Tri Wahyudi (2019) dengan judul "*Analysis Of Regional Financial Independence Towards Economic Growth And Human Development Index (Case Study: SWP Gerbangkertasusila Plus)*" hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota SWP Gerbangkertasusila plus mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di wilayah

ini. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten dan Kota telah mampu menggali dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing sehingga secara tidak langsung pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD-nya.

20. Iqbal Lhutfi, Hamzag Ritchi, dan Ivan Yudianto (2020) dengan judul “*Do The Growth Of Original Local Government Revenues And The Growth Of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap *fiscal stress* di kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	M. Ali dan Maisyuri 2017 pengaruh desentralisasi fiskal dan PAD terhadap kinerja keuangan daerah Kab. Aceh utara	- Desentralisasi Fiskal - Pendapatan Asli Daerah	- Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal dan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di kab. Aceh utara.	Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Volume 3, No. 1 Februari 2017 STIE Lhokseumawe
2	Eughnia Christy, Een N Walewangko, Patrick Ch, Wauran 2019 Dampak Desentralisasi	- Desentralisasi Fiskal	- Kinerja Keuangan - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan PAD dan pendapatan transfer sebagai variabel indikator desentralisasi fiskal berpengaruh	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 4 2019 Universitas

	Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara			signifikan dan mempunyai arah positif terhadap kinerja keuangan daerah di provinsi sulawesi utara yang diukur dengan kemandirian keuangan daerah. dan kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara.	Samratulangi
3	Khoirul Anwar Dan Lidya Primta Subakti 2013 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PAD Dan Belanja Publik Kabupaten Kota Di Indonesia	- desentralisasi fiskal - pendapatan asli daerah	-belanja publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PAD dan kenaikan belanja publik	Jurnal Proceeding PESAT Volume 5 November 2013 Universitas Gunadarma ISSN: 1858-2559
4	Pupung Hasan 2014 Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat	- Desentralisasi Fiskal - Kemandirian Keuangan Daerah		Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal kabupaten dan kota masih sangat rendah atau kurang, karena ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu mendukung pemerintah daerah untuk dapat menjadi mandiri.	Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2020
5	Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin Dan Tjahjanulin Domai 2014 Peran Pendapatan	-Pendapatan Asli Daerah -Desentralisasi Fiskal	-Pembangunan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal masih sangat kurang, karena pemerintah kota batu masih	Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 3 2014 Universitas Brawijaya

	Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah Studi Pada Dinas Penadapatan Kota Batu		memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat, dan juga desentralisasi fiskal kota batu yang masih sangat kurang, menunjukkan bahwa kota batu belum mandiri dalam pembiayaan pembangunan	ISSN: 2503- 3867
6	Indrawahyuni - Pendapatan 2020 Analisis Asli Daerah Efektivitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar		Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah kota makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukan dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.	Jurnal AkMen Vol. 17, No. 3 September 2020 Universitas Muhammad iyah Makassar e- ISSN: 2621- 4377
7	R. Dian - Desentralisasi Hardiana, Fiskal Heraini - Kemandirian Tanuatmodjo - Keuangan Dan Firina Daerah Kurnianti 2010 Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Ko ta Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade		Hasil penelitian menunjukkan kemandirian daerah yang tercermin dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian di kabupaten/kota di jawa barat masih relatif rendah meskipun terjadi peningkatan kategori pada setiap indikator. Dana transfer masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah, sehingga pola hubungan pemerintah pusat dan daerah di jawa barat masih	Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2 Desember 2020 Universitas Pendidikan Indonesia

	Otonomi Daerah Di (Indonesia)			kategori konsultatif dan partisipatif.	
8	Vionza Demora 2016 Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktifitas Belanja Daerah Kota Jambi	- Desentralisasi Fiskal - Kemandirian PAD	-Produktivitas Belanja Daerah	Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara desentralisasi dan kemandirian fiskal dengan produktivitas belanja di kota jambi tahun 2001-2013, mempunyai hubungan/korelasi tetap kuat dan nyata, dengan pola hubungan yang positif	e-Jurnal Perspektif ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5, No. 1 Januari-April 2016 Universitas Jambi ISSN: 2303-1255
9	Moch. Rudy Setyawan Dan Syamsul Arif 2019 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017)	- Desentralisasi Fiskal	-Pertumbuhan Ekonomi -Belanja Modal -Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 9 kota di provinsi jawa timur tahun 2008-2017	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4, No. 2 2019 Universitas 17 Agustus 1945 ISSN: 2503-4634
10	Anggi Pratama, Bagus. H, Ilham 2018 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Ko	- Pendapatan Asli Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	-Transfer Pemerintah Pusat -Efisiensi Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menyatakan PAD dan transfer pemerintah pusat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan. Dan secara simultan PAD, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi & Publik Vol. 9, No. 1 2018 Universitas Pembangunan Panca Budi ISSN: 2087-4669. Hal 192-206

	ta Di Provinsi Sumatra Utara				
11	Juli Panglima Saragih 2014 Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi	Desentralisasi fiskal		Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi masih terdapat permasalahan. Terkait dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah, walaupun politik desentralisasi fiskal sejak otonomi daerah diberlakukan.	Jurnal Politica Vol. 5, No. 2 November 2014 DPR RI
12	Fatmawaty Laraga, Idrus Usu, Ilyas Lamuda, 2022. Analisis pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	Kemandirian Keuangan Daerah		Hasil dari penelitian ini bahwa secara parsial, rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1 2022. ISSN: 2614-3097
13	Ermawati Y. Karim, Debby Ch. Rotinsulu Dan Maulana Th. B. Maramis 2018 Pengaruh Pendapatan Asli, Investasi Pemerintah Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara	Pendapatan Asli Daerah	- Investasi Pemerintah - Angkatan Kerja - Pertumbuhan Ekonomi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, investasi pemerintah dan angkatan kerja tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi maluku utara. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan berpengaruh, sedangkan investasi pemerintah dan angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Jurnal Berkala efisiensi Vol 18, No. 5 2018 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

				terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi maluku utara	
14	Ifrizal, Dermawis, Dan Sulaiman 2014 Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai	Pendapatan Asli Daerah	- Investasi - Belanja Pegawai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) investasi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh. (2) investasi dan pendapatan asli daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh	Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol.3, No. 2 2014 ISSN: 2302-0164
15	Fitria Yulianti Kartika Dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo 2017 Penelusuran Peranan Sumber Pendapatan Dan Fiskal Stress Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011	- Desentralisasi Fiskal - Pendapatan Asli Daerah	- DAU - DAK - <i>Fiscal Stress</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap DDF, DAU, berpengaruh negatif terhadap DDF, DAK berpengaruh negatif terhadap DDF, FS berpengaruh positif terhadap DDF	Jurnal Telaah Manajemen Vol. 14, Edisi 1 Februari 2017 Universitas Stikubank Semarang
16	Abdul Bashir 2011 Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi	Desentralisasi Fiskal	- Pertumbuhan ekonomi - Ketimpangan pendapatan - Jumlah penduduk miskin	Hasil penelitian menunjukkan (1) desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan	Jurnal Kajian Ekonomi Vol. 10, No. 2 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

	Sumatra Selatan		- Indeks pembangunan manusia - Penyerapan tenaga kerja	terhadap ketimpangan pendapatan. (3) desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (4) desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (5) desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	ISSN: 1693-0436
17	Nobu Akai Dan Masayo Sakata 2002 <i>Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States</i>	Desentralisasi Fiskal	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Of Urban Economics, Vol. 52, No. 1 DOI: 10.1016/s0094-1190(02)00018-9
18	Ghina Kamalia Sofa (2021) Dengan Judul “ <i>Factors Affecting The Decentralization Of Local Government (Case Study In Tasikmalaya City</i> ”	Desentralisasi Fiskal		hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif parsial terhadap desentralisasi fiskal dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal	Jurnal Proaksi Vol. 8, No.1 Januari-Juni 2021 Universitas Padjadjaran p-ISSN: 2089-127x, e-ISSN: 2685-9750
19	Fidza Amalina, Moh.Khusaini Dan Setyo Tri Wahyudi (2019) Dengan Judul “ <i>Analysis Of Regional Financial</i> ”	Kemandirian Keuangan Daerah	- Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Pembangunan Manusia	hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota SWP Gerbangkertasusila plus mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat	Wacana Vol.22, No. 1 2019 Universitas Brawijaya ISSN: 1411-0199 e-ISSN: 2338-1884

					<p><i>Independence Towards Economic Growth And Human Development Index (Case Study: SWP Gerbangkertas usila Plus)</i></p>	<p>kesejahteraan di wilayah ini. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten dan kota telah mampu menggali dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing sehingga secara tidak langsung pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD-nya.</p>
20	<p>Iqbal Lhutfi, Hamzag Ritchi, Dan Ivan Yudianto 2020 <i>Do The Growth Of Original Local Government Revenues And The Growth Of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress</i></p>	<p>Pendapatan asli daerah</p>	<p>- Pertumbuhan belanja modal - <i>Fiscal stress</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> di kabupaten dan kota di provinsi jawa barat. Secara parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i> dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di provinsi jawa barat</p>	<p>Journal Of Rconomics, Business, and Accountancy Ventura Vol. 23, No. 1, April-July 2020 doi: 10.14414/je bav.v23il.11 727</p>	

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

2. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun secara simultan pada Periode Tahun 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Periode Tahun 2016-2020.
2. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial pada Periode Tahun 2016-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan serta referensi keilmuan administrasi publik dalam hal pengkajian keuangan Daerah khususnya yaitu mengenai Pengaruh Desentraslisi Fiskal dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, wawasan, serta pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan memahami ilmu yang berhubungan dengan judul penelitian, baik dari segi teoritis maupun dari segi sosialisasinya secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lanjutan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai informasi dari hasil kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam rangka memperbaiki tingkat kemandirian daerah dan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) serta website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian direncanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di Lampiran Penelitian.